

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menggambarkan peserta didik dan menimbanginya dari segi nilai dan arti (Arifin, 2013). Kegiatan evaluasi sebagai kegiatan yang meliputi pengukuran dan penilaian (Arikunto, 2013). Berdasarkan definisi – definisi tersebut, dapat disimpulkan evaluasi berkaitan dengan nilai dan arti.

Dari definisi evaluasi yang telah dijabarkan, sangat jelas bila istilah evaluasi berbeda dengan istilah penilaian. Istilah evaluasi digunakan untuk konteks yang lebih luas, selain itu dapat dilaksanakan oleh pihak eksternal maupun internal, sedangkan penilaian digunakan untuk konteks yang lebih sempit, bersifat kualitatif dan sering menggunakan ukuran baik buruk. Istilah penilaian juga memiliki kecenderungan dilaksanakan oleh orang – orang internal. Evaluasi dapat disimpulkan sebagai kegiatan pengolahan, pengukuran dan penilaian suatu kondisi dengan data yang relevan yang bermanfaat untuk memberikan pilihan alternatif dalam pengambilan keputusan.

b. Tujuan Evaluasi

Tujuan sebuah penelitian evaluatif sangat penting untuk mengukur keberhasilan kegiatan evaluasi itu sendiri. Tujuan evaluasi dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Walau begitu penelitian evaluatif pada dasarnya adalah untuk menyempurnakan dan menguji sebuah pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek, selain itu juga mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut (Wirawan, 2012). Tujuan evaluasi secara sederhana dapat disimpulkan berhubungan secara khusus

dengan seberapa efektif atau seberapa tidak efektif, seberapa bernilai atau seberapa tidak bernilai, seberapa cocok atau seberapa tidak cocok, sebuah tindakan, proses atau produk dalam persepsi – persepsi individual yang menggunakan informasi yang disediakan oleh evaluator.

Secara lebih rinci tujuan evaluasi dijabarkan menjadi lima poin yaitu : (1) membantu perencanaan untuk pelaksanaan program; (2) membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program; (3) membantu dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau penghentian program; (4) menemukan fakta – fakta dukungan dan penolakan terhadap program; (5) memberikan sumbangan dalam pemahaman proses dan faktor yang mempengaruhi program (Sukmadinata, 2009).

2.2 Kepemahaman IFRS

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ‘paham’ memiliki arti pandai atau mengerti benar sedangkan “pemahaman” adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ernest Hilgard (dalam Wiirawan, 2012) membagi pemahaman menjadi enam yaitu, (1) Pemahaman yang dipengaruhi kemampuan dasar (2) Pemahaman yang dipengaruhi pengalaman belajar yang lalu (3) pemahaman tergantung kepada pengaturan situasi (4) pemahaman didahului oleh usaha coba – coba (5) Belajar dengan pemahaman dapat diulang, (6) pemahaman dapat diaplikasikan bagi pemahaman situasi lain.

Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Pemahaman akuntansi berarti kemampuan untuk mengukur, mengklasifikasikan (membedakan) dan mengikhtisarkan (menyajikan) laporan keuangan, maka pemahaman IFRS merupakan sebuah kemampuan untuk mengukur, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan unsur – unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam IFRS (Ankarath, 2012).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti suatu topik atau informasi setelah mendapatkan

pembelajaran atau informasi dari sumber – sumber yang ada. Pemahaman IFRS merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal, mengerti dan memahami standard dan ketentuan – ketentuan yang berlaku IFRS. Tingkat pemahaman IFRS ini dapat diukur dari sejauh mana seseorang mengetahui dan mengerti IFRS.

2.3 Kompetensi IFRS

Kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. Kompetensi mahasiswa mengenai IFRS dikhususkan pada kompetensi dalam memahami dan mengaplikasikan IFRS. Kategori pemahaman dan aplikasi kompetensi IFRS diambil dari penelitian Yoon, Vedd & Jones (2013) taksonomi bloom yang telah direvisi oleh Andrey Pulungan (2013) sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Tabel 2.1
Taksonomi Bloom Direvisi

Tujuan Pembelajaran Mahasiswa	Kategori Taksonomi Bloom yang Direvisi	Level Taksonomi
Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara <i>principles – based</i> dan rule based	Pemahaman	2
Mahasiswa mampu membandingkan persamaan dan perbedaan antara IFRS dan PSAK berbasis IFRS	Pemahaman	2
Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan	Pemahaman	2

konvergensi IFRS di Indonesia saat ini		
Mahasiswa mampu menjelaskan proses penetapan standar IFRS	Pemahaman	2
Mahasiswa mampu membaca dan mengerti laporan keuangan berbasis IFRS	Aplikasi	3
Mahasiswa mampu mencatat transaksi keuangan sesuai dengan IFRS	Aplikasi	3
Mahasiswa mampu membuat laporan keuangan berbasis IFRS	Aplikasi	3

Sumber : Yoon, Veed, Jones dalam (Pulungan, 2013)

2.4 Gambaran Umum IFRS

International Financial Reporting Standards merupakan seperangkat standar akuntansi global yang dikembangkan oleh Dewan Standar Internasional yaitu *International Accounting Standards Board* (IASB). Seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), IASB merupakan badan independen yang membuat peraturan akuntansi. Tidak seperti DSAK, IASB tidak membuat peraturan akuntansi untuk suatu negara tertentu melainkan dengan membuat peraturan akuntansi yang dapat digunakan oleh berbagai negara dengan tujuan mengembangkan seperangkat standar akuntansi global. IASB mencoba membuat IFRS menjadi *globally accepted accounting*

principles bagi perusahaan – perusahaan di seluruh dunia. Standar laporan keuangan yang disusun oleh setiap negara diselaraskan dengan sistem perekonomian, sistem hukum dan politik, serta sistem budaya korporasi yang berlaku di negara tersebut (Verani dkk, 2012). Dari sudut pandang isi, IFRS menetapkan ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang terkait dengan transaksi dan peristiwa yang terutama terjadi dalam industri khusus (Nelson, 2014).

IFRS mempunyai kerangka dasar yang terkait dengan basis penyusunan dan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus dipenuhi, sehingga laporan tersebut berguna bagi investor dan para pemakai laporan keuangan lainnya. Terdapat empat karakteristik utama yang harus dipenuhi sehingga laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan (Verani dkk, 2012). Keempat karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami atau *understandable* oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak – pihak yang berasal dari berbagai kalangan dengan latar belakang pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda – beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal, dan mudah dipahami. Namun perlu diketahui penyajian laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah – istilah ilmu keuangan ataupun industri yang sulit dipahami oleh orang – orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.
- (2) Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Sebab jika tidak, maka laporan keuangan tidak akan memberikan manfaat bagi para penggunanya dalam melakukan evaluasi keuangan entitas bisnis tersebut. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prinsip materialitas.
- (3) Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan andal atau dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat

dipercaya apabila disajikan secara jujur. Disamping itu, laporan keuangan harus disajikan dengan prinsip *substance over form* atau penyajian yang lebih mengutamakan hakikat ekonomi ketimbang hakikat formal. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati – hatian atau konservatif dan lengkap.

- (4) Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun – tahun sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan secara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding, laporan keuangan juga harus menggunakan teknik – teknik dan basis – basis pengukuran dengan konsisten.

Sejak tahun 2005, seluruh 27 negara di Eropa (EU) telah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan IFRS. Selain itu, lebih dari 100 negara lainnya telah mengadopsi IFRS bagi perusahaan publiknya. Berikut ini adalah nama – nama negara yang telah mengadopsi IFRS (Warren dkk, 2016:D-2).

Tabel 2.2

Daftar Nama Negara yang Telah Mengadopsi IFRS

No	Nama Negara	No	Nama Negara	No	Nama Negara
1	Abu Dhabi –Uni Emirat Arab	24	Israel	47	Nigeria
2	Afrika Selatan	25	Italia	48	Nikaragua
3	Argentina	26	Jamaika	49	Norwegia
4	Australia	27	Jerman	50	Panama

5	Austria	28	Kanada	51	Peru
6	Belanda	29	Kenya	52	Polandia
7	Belgia	30	Korea Selatan	53	Portugal
8	Bosnia	31	Kosta Rika	54	Prancis
9	Brasil	32	Kroasia	55	Qatar
10	Bulgaria	33	Kuwait	56	Republik Cheska
11	Cile	34	Latvia	57	Republik Slovakia
12	Denmark	35	Lebanon	58	Rumania
13	Dubai – Uni Emirat Arab	36	Libia	59	Rusia
14	Ekuador	37	Liechtenstein	60	Selandia Baru
15	Estonia	38	Lithuania	61	Serbia
16	Finlandia	39	Luksemburg	62	Slovenia
17	Guatemala	40	Meksiko	63	Spanyol
18	Hong Kong	41	Mesir	64	Swedia
19	Hungaria	42	Mongolia	65	Turki
20	Indonesia	43	Belanda	66	Yordania
21	Irak	44	Selandia Baru	67	Yunani
22	Inggris	45	Nikaragua	68	Zambia
23	Irlandia	46	Nigeria		

Sumber : www.iasplus.com dalam (Warren dkk, 2016:D2), data diolah kembali.

Di negara dengan ekonomi maju, Jepang sedang mempertimbangkan adopsi wajib pada tahun 2016, India memungkinkan penggunaan terbatas atas IFRS, dan

China sedang mengkonversikan standarnya dengan IFRS dari waktu ke waktu. Selain itu, G 20 (*Group of 20 Leadership*) telah menyerukan standar akuntansi global yang seragam.

2.4.1 Perkembangan IFRS di Indonesia

Indonesia tidak ketinggalan untuk memperbaharui standar laporan keuangannya. Indonesia secara resmi mengadopsi IFRS untuk perusahaan Indonesia sejak tahun 2008 dan secara efektif diterapkan pada tahun 2012. Penerimaan luas yang diperoleh IFRS di seluruh dunia, bagaimanapun juga telah menempatkan tekanan besar pada Indonesia untuk melaraskan SAK dengan IFRS. Indonesia perlu mencapai konvergensi SAK dan IFRS (Warren dkk, 2016).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan pemerintah Indonesia yang memiliki kewenangan atas akuntansi dan pengungkapan keuangan untuk perusahaan publik Indonesia. OJK telah memperkenalkan peraturan dalam menyajikan laporan keuangan yang biasa disebut sebagai peraturan VIII.G.7. Dalam peraturan tersebut, OJK mewajibkan perusahaan publik untuk menerapkan SAK yang diterbitkan oleh DSAK. OJK dan DSAK memiliki kesepakatan bersama bahwa perusahaan publik Indonesia harus menerapkan SAK dan SAK akan dikovergensikan ke IFRS. Salah satu keterbatasan utama dalam konvergensi adalah DSAK dan IASB terus beroperasi sebagai lembaga yang menetapkan standar akuntansi untuk yuridiksi masing – masing. Dengan demikian, konvergensi tidak akan menghasilkan satu set standar akuntansi global. Hanya standar yang melalui proses penetapan standar gabungan DSAK – IASB yang akan dirilis. Standar yang tidak melalui proses penetapan standar gabungan dapat menciptakan ketidakonsistenan antara SAK dan IFRS. Dengan demikian,

konvergensi tidak menjamin keseragaman lengkap antara SAK dan IFRS.

Sebuah ringkasan singkat dari keputusan Indonesia yang utama yang berhubungan dengan IFRS diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjalanan Menuju IFRS

Tahun	Proses
2008 – 2011	<ul style="list-style-type: none"> • DSAK memutuskan untuk mengadopsi IFRS ke dalam SAK • Mempersiapkan semua infrastruktur yang diperlukan seperti pendidikan dan pelatihan, peraturan, dan teknologi • Mengantisipasi konsekuensi adopsi dari IFRS
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan proses adopsi dan untuk menyelesaikan dan menyiapkan semua infratsruktur yang dibutuhkan
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi pertama dari SAK yang telah mengadopsi IFRS oleh perusahaan publik • Mengevaluasi semua konsekuensi ekonomi dari adopsi IFRS
2013 – 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Meninimalkan perbedaan antara SAK dan IFRS secara bertahap • Mendidik dan melatih perusahaan publik yang terdaftar dalam mengelola dan mengantisipasi setiap revisi SAK

Sumber : (Warren dkk, 2016:D3)

Tahun 2009 Indonesia belum mewajibkan perusahaan – perusahaan *listing* di Bursa Efek Indonesia menggunakan IFRS sepenuhnya, melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan nasional atau PSAK. Namun pada tahu 2010 bagi perusahaan yang memenuhi syarat, adopsi IFRS sangat diajurkan. Sedangkan pada tahun 2012, Dewan Pengurus IAI bersama – sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan DSAK merencanakan untuk

menyusun atau merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IAS/IFRS versi 1 Januari 2009 (www.iaiglobal.or.id).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyatakan bahwa tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi lima tingkat, yaitu:

- (1) *Full Adoption* yaitu suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang digunakan oleh negara tersebut;
- (2) *Adopted* yaitu program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. *Adopted* maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut;
- (3) *Piecemeal* yaitu suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja;
- (4) *Referenced (konvergence)* yaitu sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraph yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar;
- (5) *Not adopted at all* yaitu suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

2.4.2 Proses Konvergensi IFRS di Indonesia

Konvergensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penggabungan dua atau lebih, untuk bertemu dan bersatu dalam satu titik. Konvergensi dalam International Financial Reporting Standar berarti penggabungan atau mengintegrasikan standar akuntansi yang ada di setiap negara untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan yaitu IFRS.

Setelah melalui tahap adopsi dan implementasi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2008 mengeluarkan keputusan untuk melakukan konvergensi dengan IFRS yang akan diberlakukan secara efektif pada tahun 2012. Mulai tahun 2007, DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) melakukan proses konvergensi semua standar dengan IFRS. Proses konvergensi tahun 2008 lebih ketat karena standar yang diterbitkan benar –

benar mengacu pada IFRS. Jika terdapat pengecualian, DSAK harus mengkaji dan memberikan alasan mengapa pengecualian tersebut diperlukan (Martiani dkk, 2014:29-30). Proses konvergensi tersebut mengharuskan DSAK melakukan proses pengembangan dengan tiga kategori yaitu sebagai berikut :

- (1) Merevisi standar akuntansi yang telah ada untuk disesuaikan dengan pengaturan sesuai dengan IFRS terbaru. Dalam proses revisi ini, nomor standar tidak berubah namun judul standar ada beberapa yang berubah untuk disesuaikan dengan nama IFRS.

Contoh: PSAK 16 Aktiva Tetap direvisi menjadi PSAK Aset Tetap (revisi 2007), PSAK 22 Penggabungan Usaha direvisi menjadi PSAK 22 Kombinasi Usaha (Revisi 2009), PSAK 4 Laporan Konsolidasi direvisi menjadi PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tersendiri (revisi 2009).

- (2) Menambahkan standar baru yang sebelumnya belum diatur dalam PSAK. Standar baru yang diterbitkan ini ada yang menggunakan nomor baru namun ada juga yang menggunakan nomor PSAK lain yang sejenis.

Contoh: PSAK 13 Investasi diubah menjadi PSAK 13 Properti Investasi, kedua standar tersebut sangat berbeda. PSAK 50 Akuntansi Efek (revisi 1999) direvisi menjadi PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (2006), kemudian diganti lagi dengan PSAK Instrumen Keuangan: Penyajian (revisi 2010).

- (3) Mencabut PSAK yang tidak ada standarnya dalam IFRS. Pencabutan PSAK tersebut dilakukan dengan menerbitkan PSAK baru yang otomatis menghapuskan PSAK lama atau dengan menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK).

Contoh: PSAK 9 Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek tidak berlaku, setelah diberlakukannya PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009). PSAK 17 Penyusutan tidak berlaku setelah diterbitkan PSAK 16 Aset Tetap (revisi 2007). PPSAK 1 berisikan pencabutan PSAK 32 Akuntansi

Kehutanan, PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol.

Pada bagian awal setiap standar diterbitkan, dijelaskan bahwa standar tersebut merupakan adaptasi dari IFRS berikut nomornya. Terdapat penjelasan perbedaan antara IFRS dengan PSAK. Perbedaan tersebut biasanya terkait dengan tanggal efektif, perbedaan redaksional, dan perbedaan standar. Perbedaan standar contohnya mengenai ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan. Menurut PSAK 1, urutannya sesuai dengan urutan likuiditas, yaitu dimulai dengan paling atas kas dan aset lancar hingga aset tidak lancar, liabilitas lancar hingga ekuitas. Sedangkan, IAS 1 menyarankan penyajian paling atas adalah aset tidak lancar hingga aset lancar dan ekuitas hingga liabilitas lancar atau kebalikan dari yang biasa ditemukan di Indonesia.

2.4.3 Manfaat Konvergensi IFRS

IFRS merupakan salah satu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Manfaat dari adanya suatu standar akuntansi global dan kualitas akuntansi menurut (Siregar, 2012) adalah:

- (1) Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal;
- (2) Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik;
- (3) Perusahaan – perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi;
- (4) Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi.

Manfaat utama yang diperoleh dari harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan adalah adanya pemahaman lebih baik atas laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan yang berasal dari berbagai negara. Hal ini memudahkan perusahaan menjual sahamnya secara lintas negara atau lintas pasar modal. Selain itu, memberikan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan yang menghabiskan banyak dana setiap tahunnya dan juga dapat menambahkan kepercayaan investor asing terhadap laporan keuangan perusahaan – perusahaan nasional (Purba, 2010).

Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus (www.aiaglobal.or.id) :

- a. Meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
- b. Mengurangi biaya SAK;
- c. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan;
- d. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan;
- e. Meningkatkan transparansi keuangan;
- f. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal;
- g. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan

2.4.4. Dampak IFRS pada Kurikulum Akuntansi

Beberapa tahun terakhir, negara dengan ekonomi berkembang menjadi peluang investasi yang penting dan implementasi IFRS menjadi darana penarik investor baru (Albu dkk, 2012). Integrasi IFRS pada kurikulum merupakan suatu keharusan. Sebagian besar universitas di Amerika Serikat mengintegrasikan IFRS pada kurikulum pengajaran mereka, meliputi *introductory financial accounting*, *intermediate financial accounting* dan *advanced financial accounting* (Weiss, 2011). Di Indonesia konvergensi dapat dilakukan pada seluruh *grade* akuntansi keuangan, manajemen keuangan, dan analisis laporan keuangan.

Standar IFRS yang baru menuntut dilakukannya perubahan di praktik – praktik akuntansi yang sudah ada, terutama terkait dengan pengembangan standar berbasis prinsip (*principle – based*) dan pengukuran berbasis nilai wajar (*fair value*). Standar sebelumnya lebih mendasarkan pada pengembangan berbasis aturan (*ruled based*) dan pengukuran berbasis biaya historis (*historical cost*). Kedua, pembelajar harus pula mempelajari IFRS yang merupakan bentuk kesepatan baru yang diterima oleh banyak negara dan pelaku bisnis. Hal ini menyebabkan lembaga pendidikan akuntansi harus menyiapkan mereka agar siap menghadapi perubahan. Untuk itu kesiapan tenaga pengajar yang memahami konvergensi IFRS sangat diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran akuntansi yang berbasiskan IFRS. Hal ini memerlukan komitmen dan kerja sama tim pengajar di masing – masing institusi (Herawati, 2011).

2.4.5 Masalah dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Konvergensi IFRS

Negara – negara menghadapi masalah dalam melaksanakan konvergensi standar akuntansi nasionalnya dengan IAS/IFRS. Tetapi jenis dan bobot masalah dan tantangan yang dihadapi masing – masing negara berbeda – beda. Masalah yang dihadapi Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Australia, Jepang dan Indonesia berbeda.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia menurut (Kartikahadi dkk, 2016:27) antara lain sebagai berikut:

(1) Ketidakstabilan nilai rupiah

Sehubungan dengan nilai rupiah yang cenderung lemah di pasar valuta asing, dan sering kali tidak stabil, maka perubahan IAS 21 *The Effect of Change in Foreign Exchange Rates* I mendekati FASB (*Finally Accounting*

Standart Board) akan mempunyai dampak serius, seperti kejadian di tahun 1978, 1983, 1986, 1997, dan 1998

(2) Landasan hukum yang berbeda

Aspek hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di suatu negara sering kali merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam mengadopsi suatu standar akuntansi. Misalnya dalam PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan, dalam definisi SAK termasuk peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini berbeda dengan IAS 1 *Presentation of Financial Statements* karena disesuaikan dengan UU Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. Contoh lain adalah ISAK 25 Hak atas tanah yang diterbitkan DSAK – IAI akibat adanya beragam interpretasi tentang bagaimana perlakuan tanah berdasarkan kerangka hukum tanah di Indonesia.

(3) Profesi penunjang lain yang belum berkembang setaraf internasional

Pengaplikasian beberapa standar akuntansi memerlukan dukungan dari profesi penunjang lain (penilai, aktuaris, dan lain – lain) yang setaraf dengan negara maju. Bila standar dan praktik profesi penunjang yang diperlukan di Indonesia belum berkembang setaraf dengan standar internasional, maka jelas kita akan menghadapi kesulitan dalam mengaplikasikan beberapa standar tertentu, misalnya : IAS 19 *Employee Benefits*, IAS 26 *Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plan*, IAS 39 *Financial Instruments Recognition and Measurement*, IFRS : *Insurance Contract*, IFRS 7 *Financial Instruments Disclosures* dan IAS 36 *Impairments of Assets*.

(4) Frekuensi perubahan IFRS

IASB relatif sering melakukan revisi atas standar yang dikeluarkannya. Setiap standar akuntansi perlu dipahami secara jelas sebelum diterapkan. Penyusunan laporan keuangan auditor, dan pengguna laporan keuangan perlu waktu yang cukup untuk memahami suatu standar akuntansi. Dengan frekuensi perubahan yang cukup tepat, maka menimbulkan tantangan dalam penerapannya.

Standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan seringkali terdapat kendala dikarenakan sulitnya menemukan terjemahan yang sesuai, konsistensi penggunaan terjemahan, penggunaan suatu istilah untuk penerapan konsep yang berbeda. Selain itu kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS juga menjadi hambatan. Perguruan tinggi merupakan salah satu tempat yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan IFRS. Oleh karena itu, perguruan tinggi mempunyai peran dalam proses konvergensi IFRS.

Kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan konvergensi IFRS menurut (Suyatmi dkk, 2014) adalah:

- (i) Dewan Standar Akuntansi yang kekurangan sumber daya.
- (ii) IFRS berganti terlalu cepat sehingga ketika proses adopsi suatu standar IFRS masih dilakukan, pihak IASB sudah dalam proses mengganti IFRS tersebut.
- (iii) Kendala bahasa, karena setiap standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan acapkali ini tidak mudah.
- (iv) Infrastruktur profesi akuntan yang belum siap. Untuk mengadopsi IFRS banyak metode akuntansi yang baru yang harus dipelajari lagi oleh akuntan.

- (v) Kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS.
- (vi) Dukungan pemerintah terhadap isu konvergensi.
- (vii) Biaya yang cukup tinggi untuk mengadopsi IFRS.

2.4.6 Tren Terbaru dan Tantangan Masa Depan IFRS

IFRS baru dan amandemen yang dikeluarkan selama beberapa tahun belakangan ini serta observasi di seluruh dunia, beberapa trend perkembangan IFRS telah di identifikasikan sebagai berikut (Nelson, 2014):

- (1) Globalisasi standar akuntansi tidak dapat dihentikan, dan konvergensi GAAP Amerika Serikat terhadap IFRS dapat tercapai
- (2) Konvergensi tidak hanya dalam praktik dan ketentuan, namun juga dalam terminologi yang digunakan. Sebagai contoh, nama formal neraca bukan lagi neraca, tetapi laporan posisi keuangan
- (3) Pengukuran nilai wajar sering dan makin digunakan dan dianggap lebih relevan.
- (4) Nilai wajar harus mencerminkan kondisi pasar pada neraca (laporan posisi keuangan), yaitu direvaluasi pada masing – masing neraca (laporan posisi keuangan) ketimbang setiap tahun atau berkala, dan perubahan pada nilai wajar secara langsung diakui dalam laba atau rugi, dan bukan diakui dalam ekuitas (atau pendapatan komprehensif lain, terminologi baru lain di IFRS)
- (5) Tersedianya pilihan akuntansi yang lebih sedikit. Dalam waktu segera, hanya aka nada satu aturan untuk transaksi dan peristiwa yang serupa.
- (6) *Pos off balance sheet* (di luar neraca) tidak lagi “di luar”, dan harus diakui dalam neraca (atau secara formal dan paling baru, dalam posisi keuangan).
- (7) Di luar pengukuran nilai wajar ; pendekatan resiko atau pengungkapan berorientasi diperlukan pula, sebagai contoh, analisis resiko dan pengungkapan analisis sensitivitas sesuai dengan IFRS.

Perkembangan saat ini dan masa depan IFRS kelihatan cukup menjanjikan dan berprospek namun dalam penerapannya, terdapat tantangan yang akan dihadapi IFRS. Beberapa tantangan yang akan dihadapi IFRS secara global menurut (Nelson, 2014:14) adalah:

- (1) Perbedaan akuntansi historis diakibatkan dari banyak alasan, termasuk masalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, sejarah, kebudayaan, hukum dan yang lain
- (2) Kegagalan perusahaan secara signifikan telah mengubah kerangka kerja regulasi dalam bisnis, termasuk akuntansi. Kegagalan di berbagai negara dan wilayah masih berpengaruh terhadap praktik nasional dan IFRS. Perubahan tersebut tidak terhindarkan.
- (3) Pengalaman dalam menerapkan IFRS masih terbatas, dan suatu proses akumulasi pengalaman dapat memakan waktu yang lebih lama. Perubahan lebih lanjut atau revolusi IFRS dapat terjadi.

2.5 Empat Standar Akuntansi yang Berlaku di Indonesia

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat standar, (Martiani dkk, 2013:15) menyatakan bahwa keempat standar tersebut sering disebut sebagai empat pilar standar akuntansi yaitu:

- (i) Standar Akuntansi Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Standar ini mengadopsi IFRS mengingat Indonesia, melalui IAI, telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh mulai tahun 2012.
- (ii) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas

publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Standar ini mengadopsi IFRS untuk *small medium enterprise* (SME) dengan beberapa penyederhanaan.

Standar ETAP lebih sederhana dan tidak banyak perubahan dari praktik akuntansi yang saat ini berjalan. Contoh penyederhaan dalam standar ETAP adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada laporan laba rugi komprehensif. Pengaruh laba komprehensif disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen ekuitas dalam neraca.
- b. Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar.
- c. Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan, beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

(iii) Standar Akuntansi Syariah

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi berbasis syariah. Standar akuntansi syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, dan *istishna*. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah.

Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK syariah.

(iv) Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual diterapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama sebagai berikut (Martiani dkk, 2012:16) :

(1) *Principles – Based*

Standar yang menggunakan *Principles – Based* hanya mengatur hal – hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sedangkan standar yang *rule based*, memuat ketentuan pengakuan akuntansi secara detail. Keunggulan pendekatan ini akan menghindari dibuatnya perjanjian atau transaksi mengikuti peraturan dalam konsep pengakuan. Penyusunan laporan keuangan dapat merancang suatu transaksi sehingga dapat diakui secara akuntansi dan bukan melihat dari substansi ekonomi dari transaksi tersebut. Namun, standar yang bersifat *principles – based* mengharuskan pemakainya untuk membuat penilaian (*adjustment*) yang tepat atas suatu transaksi untuk menentukan substansi ekonominya dan menentukan standar yang tepat untuk transaksi tersebut.

(2) Nilai wajar

Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (*fair value*). Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi nilai wajar lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep harga perolehan yang mendasarkan penilaian pada nilai perolehan pertama (*historical cost*). Banyak pengakuan akuntansi saat ini yang dasar penilaiannya masih menggunakan

historical cost. IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih luas untuk beberapa item, seperti aset tetap dan aset tak berwujud, dibuka opsi penggunaan nilai wajar selain nilai perolehan. Nilai wajar lebih relevan namun harga perolehannya diyakini lebih *reliable*.

(3) Pengungkapan

Mengharuskan lebih banyak pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen.

2.6 Bidang – bidang Akuntansi

Kompleksnya masalah perusahaan yang didorong kemajuan teknologi, bertambahnya peraturan pemerintah terhadap kegiatan perusahaan, maka para akuntan dituntut untuk mengkhususkan keahliannya dalam bidang akuntansi Sumarsan (dalam Rudianto, 2012), jenis bidang akuntansi secara khusus terbagi dalam :

- A. Akuntansi Manajemen, yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan. Sebagai contoh, menyediakan data biaya guna penentuan harga jual produk tertentu dan pertimbangan terkait.
- B. Akuntansi Biaya, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.

- C. Akuntansi Keuangan, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak – pihak di luar perusahaan.
- D. Auditing, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut dengan *internal auditor*. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor *independen* atau akuntan publik.
- E. Sistem akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesain dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
- F. Akuntansi sektor publik, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.

Peraturan terkini, seperti US Sarbanes – Oxley Act of 2002 atau aturan serupa di banyak bagian dunia, telah memunculkan permintaan yang meningkat bagi segala jenis akuntan. Selain permintaan keseluruhan, beberapa bidang akuntansi tertentu menerima permintaan yang sangat tinggi (Harisson dkk, 2012) yaitu :

- (i) Pelaporan berkelanjutan

Pelaporan berkelanjutan melibatkan pelaporan terhadap kinerja suatu organisasi berkenaan dengan persoalan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (*health, safety, and environment* – HSE). Ketika bisnis mengambil minat yang besar terhadap persoalan lingkungan, akuntan publik semakin terlibat dalam pelaporan seperti kesehatan karyawan, tingkat kecelakaan dalam pekerjaan, emisi dari polutan tertentu, limbah, buangan, volume limbah yang dihasilkan, serta inisiatif untuk mengurangi dan meminimalkan insiden dan buangan semacam itu. Perusahaan utilitas, manufaktur, kimia secara khusus terpengaruh oleh persoalan lingkungan. Sebagai akibatnya, mereka berpaling kepada CPA (*Certified public accountant*) untuk menetapkan sistem pencegahan demi memastikan ketaatan dan menghindari klaim di masa mendatang, perselisihan, atau kebutuhan asistensi ketika implikasi hukum benar – benar muncul.

Pelaporan *corporate social responsibility* (CSR) serupa dengan pelaporan HSE tetapi dengan fokus yang lebih luas terhadap persoalan sosial seperti praktik tenaga kerja etis, pelatihan, pendidikan, serta keragaman tenaga kerja dan inisiatif filantropis perusahaan. Kebanyakan perusahaan terbesar di dunia memiliki inisiatif CSR yang ekstensif.

(ii) *Jasa Assurance*

Jasa Assurance adalah jasa yang disediakan oleh CPA yang meningkatkan kualitas dari informasi, atau konteksnya, untuk pengambil keputusan. Informasi semacam itu dapat berupa informasi keuangan atau non keuangan, dan dapat berkenaan dengan kejadian masa lalu atau pun mengenai proses atau sistem yang berkelanjutan. Konsep luas tersebut melibatkan jasa audit dan attestasi dengan perbedaannya dari konsultasi karena berfokus terutama pada meningkatkan informasi alih – alih menyediakan nasihat atau memegang sistem. Keahlian analitis

dan pemrosesan informasi dapat digunakan dengan menyediakan *jasa assurance* di bidang yang berkisar dari perdagangan elektronik hingga perawatan manula, penilaian resiko komprehensif, penilaian bisnis, pengukuran kinerja entitas, dan penilaian kualitas sistem informasi.

(iii) Jasa Teknologi Informasi

Perusahaan tidak dapat bersaing secara efektif jika sistem teknologi informasinya tidak memiliki kekuatan atau fleksibilitas untuk melaksanakan fungsi penting. Perusahaan memerlukan akuntan dengan keterampilan komputer yang kuat sehingga dapat merancang dan menimplementasikan sistem canggih agar sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan serta untuk menemukan cara untuk melindungi dan mengisolasi data. CPA yang terampil dalam penelitian dan pengembangan perangkat lunak (mencakup juga teknologi multimedia) akan sangat dihargai.

(iv) Akuntansi Internasional

Globalisasi berarti bahwa transaksi lintas batas menjadi semakin umum. Negara – negara di Eropa Timur dan Amerika Latin, yang sebelumnya memiliki ekonomi tertutup, sekarang membuka diri dan melakukan bisnis dengan mitra perdagangan yang baru. Diberlakukannya *North American Free Trade Agreement (NAFTA)* dan *General Agreement on Traffic and Trade (GATT)* telah memfasilitasi perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah seperti Lingkar Pasifik membawa volume perdagangan dan aliran keuangan yang lebih besar. Organisasi memerlukan akuntan yang memahami aturan, kesepakatan, dan hukum perdagangan internasional; persoalan *merger* dan akuisisi lintas batas; serta adat, bahasa, budaya, dan prosedur bisnis asing.

2.7 Profesi Akuntan

Profesi akuntan ke dalam beberapa kelompok menurut (Rudianto, 2012) yaitu :

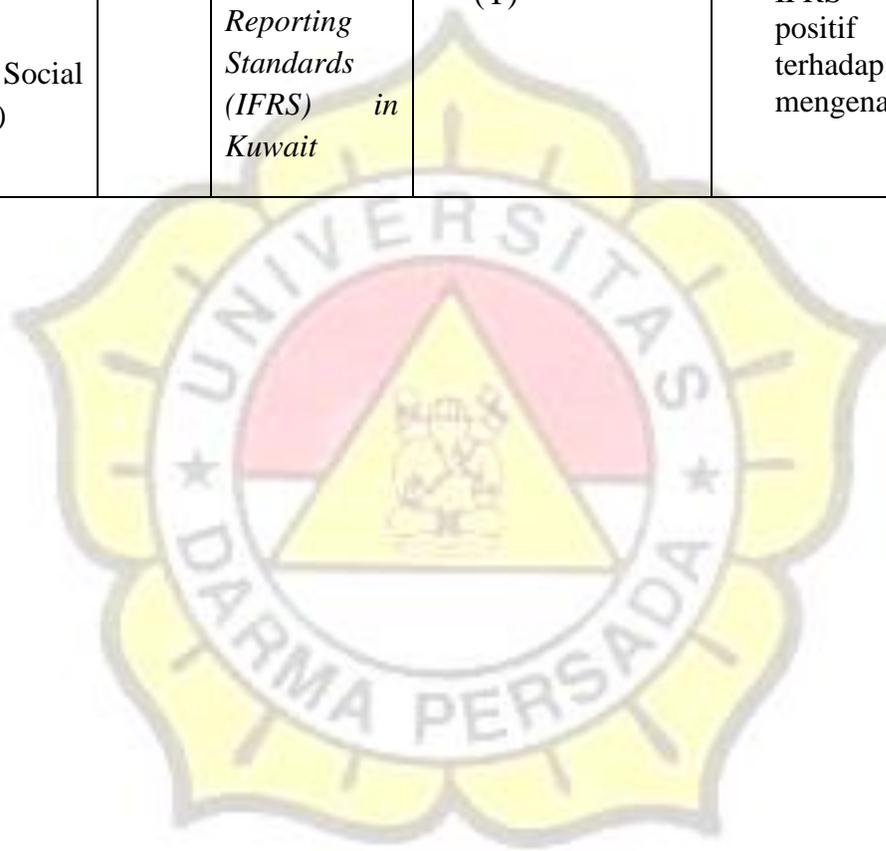
- (1) Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang disebut juga dengan akuntan perusahaan. Dalam suatu jabatan dapat diduduki mulai dari staf hingga dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan.
- (2) Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki posisi independen dan bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa mereka dalam memeriksa serta menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan.
- (3) Akuntan pemerintah adalah akuntan yang berkerja untuk kepentingan pemerintah dan mengamankan berbagai kepentingan pemerintah. Akuntan pemerintah bekerja di berbagai lembaga pemerintahan, seperti berbagai departemen pemerintah, berbagai dinas pemerintah, Direktorat Pajak, Bea Cukai, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Jenderal, dan sebagainya.
- (4) Akuntan pendidik, yaitu akuntan yang mengabdikan dirinya dalam institusi tertentu yang bertugas mempersiapkan, membimbing, dan melatih nara – didik agar menjadi akuntan profesional

2.8 Penelitian Terdahulu

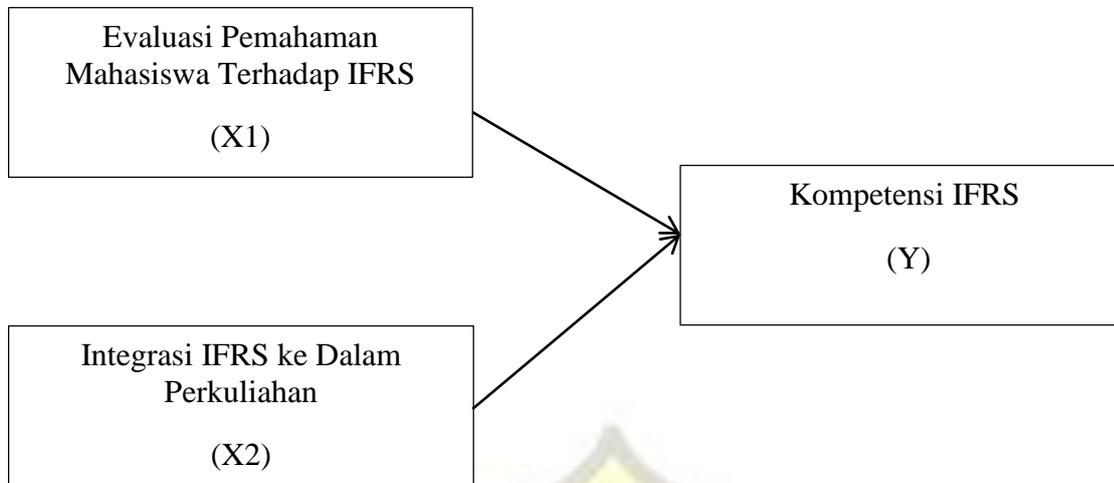
No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1	James M L Blaszczyński (<i>Journal for Global Business</i>)	2010	<i>Accounting Students Perceptions of International Financial Standards</i>	Menggunakan kuesioner yang disebar kepada 89 mahasiswa akuntansi. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif.	Secara keseluruhan, mahasiswa menilai pentingnya memiliki pengetahuan tentang IFRS yang lebih tinggi daripada pengetahuan mereka mengenai IFRS saat ini. Sebanyak 72% mahasiswa mendukung IFRS sebagai standar global untuk pelaporan keuangan.
2	Diana Nugraheni dan Andriani Ika Sulistiawati (Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis)	2012	Faktor – faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman IFRS	<ul style="list-style-type: none"> • Kecerdasan emosional (X1) • Kecerdasan Intelektual (X2) • Ketersediaan Sarana Pendidikan(X3) • Minat(X4) • Pemahaman IFRS (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Minat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman IFRS
3	Andrey Pulungan (Jurnal Akuntansi & Manajemen)	2013	Persepsi Mahasiswa Terhadap IFRS dan Kompetensi Mahasiswa Dalam Memahami dan Mengaplikasikan IFRS	Menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Sampel penelitian merupakan mahasiswa akuntansi S1 di tiga perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Kota Jakarta, Tangerang Selatan dan Bekasi.	Kompetensi IFRS penting diperlukan dalam dunia kerja dan IFRS yang sudah terintegrasi dalam mata kuliah akuntansi keuangan, mahasiswa masih berpandangan bahwa mereka belum memiliki kompetensi yang baik dalam memahami dan mengaplikasikan IFRS.

4	Bea Chiang (<i>International Business and Management</i>)	2013	<i>IFRS in the Accounting Curriculum</i>	Menggunakan kuesioner berupa 19 pertanyaan yang disebar kepada mahasiswa tingkat junior dan senior di salah satu universitas. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif	Hasilnya lebih mahasiswa merasa kurikulum yang mereka pelajari masih 90% berbasis US GAAP, mahasiswa baru mengenal IFRS dalam mata kuliah akuntansi keuangan. Mahasiswa merasa IFRS perlu diimplementasikan ke dalam kurikulum.
5	Helen dan Kh Wong (<i>Journal of Management Research</i>)	2013	<i>An Empirical Study – Adotion of International Financial Reporting Standards in Hong Kong Education</i>	Menggunakan kuesioner untuk pemngumpulan data. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif.	Mahasiswa di Hongkong tertarik untuk memperdalam pemahaman mengenai IFRS, memahami dampak positif dari mempelajari IFRS antara lain (1) Membantu dalam ujian profesi akuntan, (2) Membantu dalam perjalanan karir masa depan.
6	Farida Sri Endaryani (<i>Journal of Accounting and Banking</i>)	2016	Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Perilaku Belajar dan Minat Terhadap Tingkat Pemahaman	<ul style="list-style-type: none"> • Kecerdasan emosional (X1) • Kecerdasan spiritual (X2) • Perilaku belajar (X3) • Minat (X4) • Tingkat Pemahaman Akuntansi IFRS (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Minat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi IFRS

			Akuntansi IFRS		
7	Abdullah AL – Mutairi, Kamal Naser, Nabi – Al – Duwaila (Asian Social Journal)	2017	<i>Student's Attitude towards the Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Kuwait</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Minat (X1) • Manfaat mempelajari IFRS (X2) • Pengetahuan mengenai IFRS (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Minat (X1) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pengetahuan mengenai IFRS (Y) • Manfaat mempelajari IFRS berpengaruh positif signifikan terhadap Pengetahuan mengenai IFRS (Y)



2.9 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran memberikan gambaran singkat mengenai tahapan penelitian dari awal sampai akhir. Untuk memberikan landasan teoritis yang memadai bagi penelitian, diperlukan suatu kerangka pemikiran yang bersumber dari penalaran atas sejumlah teori dan temuan penelitian terdahulu yang ada.

Kerangka pemikiran ini mengidentifikasi variabel – variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Hubungan variabel bebas (evaluasi pemahaman mahasiswa mengenai IFRS, integrasi IFRS ke dalam perkuliahan) dengan variabel terikat (kompetensi mahasiswa) akan dijelaskan secara rinci.

Evaluasi merupakan kegiatan pengolahan, pengukuran dan penilaian suatu kondisi dengan data yang relevan. Evaluasi pemahaman mahasiswa mengenai IFRS dalam penelitian ini dikaitkan dengan kesiapan mahasiswa terhadap IFRS saat pada saat ini dan pada saat menyelesaikan pendidikan S – 1, serta dalam menghadapi dunia kerja di bidang akuntansi baik dari segi kompetensi IFRS yang dimiliki, kemudahan mendapatkan pekerjaan, gaji yang akan didapatkan dan jenjang karir.

Integrasi IFRS ke dalam perkuliahan diukur dari pengetahuan dan pemahaman mahasiswa akan perkembangan standar akuntansi dan penerapan IFRS ke dalam melalui buku – buku dan bahan ajar yang digunakan dan disampaikan pada saat perkuliahan.

Kompetensi mahasiswa dikhususkan pada kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mengaplikasikan IFRS. Pemahaman dan pengaplikasian menggunakan pertanyaan yang digunakan oleh Yoon, Veed, & Jones (2013) yang telah dimodifikasi dan didasarkan dengan pada tujuan pembelajaran sesuai dengan taksonomi bloom yang direvisi (Pulungan, 2013).

2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan – panduan dalam verifikasi (Nasir, 2014:132).

Hipotesis₁

H₀ : Tidak terdapat pengaruh langsung antara evaluasi pemahaman mahasiswa mengenai IFRS dalam menghadapi dunia kerja bidang akuntansi terhadap kompetensi mahasiswa dalam IFRS

H_a : Terdapat pengaruh langsung antara evaluasi pemahaman mahasiswa mengenai IFRS dalam menghadapi dunia kerja bidang akuntansi terhadap kompetensi mahasiswa dalam IFRS

Hipotesis₂

H₀ : Tidak terdapat pengaruh langsung antara integrasi IFRS ke dalam perkuliahan terhadap kompetensi mahasiswa dalam IFRS

H_a : Terdapat pengaruh langsung antara integrasi IFRS ke dalam perkuliahan terhadap kompetensi mahasiswa dalam IFRS